**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Laut China Selatan (selanjutrnya disingkat LCS) merupakan bagian dari Samudra Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km².Berdasarkan ukurannya, LCS ini merupakan perairan terluas kedua setelah kelima samudera.LCS merupakan sebuah perairan dengan potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional[[1]](#footnote-1).

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan LCS searah jarum jam dari utara adalah Republik Rakyat Tiongkok termasuk Macau dan Hongkong, Republik China (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia dan Vietnam. Adapun sungai-sungai yang besar yang bermuara di LCS adalah sungai Mutiara (Guangdong), Min, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig[[2]](#footnote-2).

Secara georgrafis, LCS terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya -3°, lintang antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (selat Karimata), dan batas utaranya ialah selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok Daratan . LCS terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Tiongkokdan Taiwan; di sebelah barat Filipina, laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah timur laut semenanjung Malaya dan Singapura; dan di sebelah timur Vietrnam[[3]](#footnote-3).

Kawasan LCS bila dilihat dari tatanan Laut Internasional merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Dengan kata lain, kawasan LCS yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peranannya yang sangat penting dalam jalur perdagangan, dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan LCS sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Di LCS terdapat empat kepulauan, dan karang yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di LCS tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, (seperti perselisihan mengenai PulauPhu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim Tiongkok atas kepulauan di LCS pada tahun 1974, Tiongkok menganggap LCS sebagai wilayah kedaulatan lautnya.Pada tahun 1974 ketika Tiongkok menginvasi kepulauan Paracel (yang diklaim Vietnam).Pada tahun 1979, Tiongkok dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988 yang menelan korban tenggelamnya kapal Vietnam[[4]](#footnote-4). Pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersamaan dengan Filipina, Vietnam mengganggap Kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya[[5]](#footnote-5)

Penemuan minyak dan gas bumi pertama di kepulauan Spratly dimulai pada tahun 1968. Menurut data dari *The Geology and Mineral Resources of The People’s Democratic Republif Of Tiongkok*memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat pada kepulauan Spratly adalah sekitar 1,17 miliar ton (1,6 x 10 10 Kg). Fakta tersebut menempatkan kepulauan Spratly sebagai tempat tidur cadangan minyak dunia.[[6]](#footnote-6). Sebut saja Jepang, 80% impor minyaknya diangkut memalui jalur kawasan LCS.Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya.Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perebutan banyak Negara.Sumber daya hidrokarbon juga menjadi daya tarik tersendiri.Menurut estimasi Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60-70% hidrokarbon di kawasan ini merupakan gas alam. Sementara itu, penggunaan sumber daya gas alam diproyeksikan bertambah sebanyak 5% per tahun untukdua dekade yangakan datan jumlahnya diperkirakan sebanyak 20 trilion cubic feet (Tcf) per tahun, lebih cepat daripada bahan bakar lainnya[[7]](#footnote-7).

LCS juga dikenal sebagai jalur pelayaran penting.Jalurpelayaran ini seringkali disebut *maritime superhighway* karena merupakan salahsatu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia.Lebih dari setengah lalulintas supertanker dunia berlayar melalui jalur ini lewat Selat Malaka, Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang berlayar melewati Selat Malaka dan bagianbarat daya LCS bahkan lebih dari tiga kali yang melewati TerusanSuez dan lebih dari lima kali lipatnya Terusan Panama.

Dari berbagai konflik teritorial antar negara di Asia Tenggara, konflik di LCS kini menjadi sumber ketegangan baru yang dapat menimbulkan ancaman atas keamanan regional maupun internasional.Sumber pesoalan yang membuat kawasan Asia Tenggara diliputi ketegangan adalah sengketa klaim kepemilikan wilayah di LCS, yang melibatkan beberapa negara yaitu Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Philipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.Persengketaan di kawasan ini mencakup kedaulatan teritorial maupun kedaulatan maritimnya juga.Kedaulatan teritorial yaitu menyangkut kepemilikan wilayah yang ada di daerah sengketa. Sementara kedaulatan maritim berhubungan dengan penetapan batas yang diijinkan oleh Hukum Konvensi laut PBB[[8]](#footnote-8)

Ketegangan di LCS itu telah diwarnai oleh sejumlah insiden militer atau gesekan yang melibatkan sejumlah negara pengklaim[[9]](#footnote-9). Gejala tersebut harus diwaspadai, mengingat ketegangan di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan berkembangnya berbagai insiden militer tersebut menuju terjadinya peperangan regional bahkan global yang tak hanya melibatkan kelima negara, melainkan pula menyeret keterlibatan lebih banyak lagi negara-negara lainnya ke kawasan itu. Indikasi ini tampak dari kesiapan militer Amerika Serikat yang didukung oleh Australia untuk mengirimkan armada tempurnya jika pecah perang di LCS.

Seperti dikemukakan oleh McCain, mantan perwira menengah Angkatan Laut Amerika Serikat, Washington harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan menghadapi Republik Rakyat Tiongkok(RRT). Menurutnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selalu mencari dan mencoba mengeksploitasi perpecahan yang memang sudah ada di dalam *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN)[[10]](#footnote-10).

Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di manage dengan baik, bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa *national interest* mereka terusik. Setidaknya ada dua hal mengapa kawasan ini menjadi snegketa banayak Negara.[[11]](#footnote-11)Pertama, wilayan kawasan LCS memiliki potensi ekonomi terutama minyak dan gas dan strategi militer terletak di pilihan laut internasional.Kedua, Negara-negara yang bersengketa sangat membutuhkan minyak untuk kelangsungan industry maupun kelangsungan ekonominya.

Tidak hanya itu, menurut data dari pemerintah AS LCS memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Laut ini merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya. Selain itu, menurut data Badan Informasi Energi AS, di kawasan ini tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik.

90 persen lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia pada 2035 akan melintasi perairan tersebut. Pada 1974, setahun setelah keterlibatan AS di Vietnam resmi diakhiri dengan Perjanjian Damai Paris, Tiongkok bergerak cepat "mengamankan" wilayah ini.Militer Tiongkok dikirim untuk menduduki sisi barat Kepulauan Paracel. Mereka mengibarkan bendera dan mengalahkan satu garnisun pasukan Vietnam di sana. Pasukan Vietnam mundur dan mendirikan pos permanen sekaligus menduduki Kepulauan Spratly. Di saat yang samaTiongkok memperkuat militernya di Pulau Woody, pulau terbesar di Kepulauan Paracels. Setelah Vietnam Utara dan Selatan bersatu dan membentuk Republik Sosialis Vietnam, negeri itu tetap mengukuhkan klaim terhadap Spratly dan Paracels.

Vietnam mengklaim Tiongkok tak pernah mengklaim kepemilikan Kepulauan Spratly dan Paracels sebelum 1940-an, sementara, Vietnam mengaku telah menguasai kedua kepulauan tersebut sejak abad ke-17 dan mengklaim memiliki berbagai dokumen itu membuktikan hal tersebut.Seolah dua negara belum cukup untuk memanaskan situasi di kawasan tersebut, Filipina ikut meramaikan suasana dengan mengklaim kepemilikan Kepuluauan Spratly.

Filipina mendasarkan klaim ini semata karena lokasi geografisnya yang dekat dengan Kepulauan Spratly sehingga menganggap kepulauan itu sebagai bagian dari wilayahnya. Filipina dan Tiongkok berebut gundukan Scarborough yang di dalam bahasa Tiongkok disebut dengan nama Pulau Huangyan, rangkaian pulau karang seluas 46 kilometer persegi. Kawasan sengketa ini berada sejauh 160 kilometer dari daratan Filipina dan berjarak lebih dari 800 kilometer dari Tiongkok.Lalu masih ada Malaysia dan Brunei yang juga mengklaim wilayah di LCS yang menurut kedua negara ini masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif mereka seperti ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).Brunei tidak mengklaim satu pulau pun di kawasan ini, sementara Malaysia mengklaim beberapa pulau kecil di Kepulauan Spratly sebagai wilayah negeri itu.

Selain konflik yang terjadi antara sesama negara – negara Asia di atas, sengketa ini juga memancing campur tangan Amerika Serikat yang merasa perairan LCS sangat perlu dijaga kestabilan keamanannya karena merupakan jalur perairan internasional. Menurut McCain, yang adalah mantan perwira menengah Angkatan Laut Amerika Serikat, Washington harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan menghadapi Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurutnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selalu mencari dan mencoba mengeksploitasi perpeacahan yang memang sudah ada di dalam ASEAN.Mereka mempermainkan kondisi itu untuk kemudian menekan negara-negara terkait demi agenda kepentingan dan keuntungan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sendiri. Namun, Amerika Serikat menegaskan tidak akanmengambil posisi tertentu dalam sengketa LCS. McCain menegaskan, Amerika Serikat selama ini menyambut baik hubungan kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sama sekali tidak ingin mencari konflik. Akan tetapi Amerika Serikat jugamempertanyakan perilaku agresif Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan klaim teritorialnya yang tidak bisa dibenarkan[[12]](#footnote-12)

Untuk menyelesaikan sengketa ini, Tiongkok memilih untuk melakukan negosiasi bilateral dengan negara-negara yang menjadi lawan sengketa di LCS.Namun, negeri-negeri tetangga Tiongkok mengatakan, dengan pengaruh dan wilayahnya yang besar maka secara tidak langsung Tiongkok memiliki keuntungan dibanding negara-negara di sekitarnya. Beberapa negara mengatakan, Tiongkok harus berunding dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), tetapi Tiongkok menolak usulan itu sementara ASEAN juga terbelah soal cara menyelesaikan sengketa ini.

Seperti Tiongkok, Taiwan mengklaim kedaulatan gugusan pulau di LCS dan yuridiksi atas perairan yang berbatasan dengan LCS: Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha). Pulau Taiping, yang juga dikenal sebagai Itu Aba dan berbagai nama lain, adalah pulau terbesar di gugusan pulau Spratlys. Saat ini di bawah pemerintahan Taiwan, dan juga diklaim oleh Tiongkok, Filipina dan Vietnam.

Taiwan yang pada mulanya dikatakan sebagai negara pinggiran telah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesentosaan politik yang lebih dari sekedar memadai. Dalam perjalanan ekonomi Taiwan tentu saja pernah mengalami titik krisis yaitu awal 1960-an yang cukup menyulitkan. Kecilnya daya serap pasar domestiknya, kebijaksanaan industri substitusi impor Taiwan telah mencapai batas maksimum. Ketika itu Taiwan sesungguhnya belum cukup banyak mengakumulasi modal, devisa, maupun kepercayaan kredit dari pasar keuangan dunia. Demikian pula Taiwan belum sepenuhnya memiliki teknologi yang cukup, sementara di sisi lain Taiwan justru tidak mempunyai persediaan tenaga kerja yang memadai.

Dalam sejarahnya, hubungan Tiongkok-Taiwan sangat buruk, diwarnai dengan konflik-konflik kecil yang dikhawatirkan akan menjadi perang terbuka. Apalagi banyak pihak di Taiwan yang mendesak deklarasi kemerdekaan.Namun Tiongkok tahun 2005 telah menerbitkan undang-undang, berisikan ancaman aksi militer jika Taiwan mengumumkan merdeka., rudal Tiongkok saat ini juga sudah mengarah ke Taiwan, siap kapan pun ditembakkan.Tapi dalam 20 tahun terakhir, hubungan mulai membaik.Walau secara diplomatis berseteru, namun dalam bidang ekonomi keduanya akrab, terutama setelah Ma Ying-jeou memimpin tahun 2008.

Taiwan menanamkan investasi miliaran dolar di Tiongkok, yang merupakan rumah bagi 1,3 juta orang dengan perekonomian kedua terbesar dunia. Jutaan turis dari Tiongkok juga sering berlibur ke Taiwan, kendati petugas imigrasi kedua negara saling menolak paspor.Bahkan kini sudah ada penerbangan langsung dari Tiongkok ke Taiwan, negara berpopulasi 23 juta jiwa.Menurut laman Vox.com, setidaknya ada dua alasan mengapa hubungan dua negara kian mesra. Alasan pertama, adalah saling klaim negara sudah sangat melelahkan dan perang dengan mengerahkan militer akan memakan banyak biaya dan korban jiwa. Taiwan juga tidak mungkin bergabung dengan Tiongkok, karena Taiwan memiliki standar hidup yang tinggi dan menjunjung kebebasan politik.

Alasan kedua adalah demokrasi.Sejak dibentuk 1949, Taiwan adalah negara demokratis dengan pemilihan umum yang terbuka dan menentang segala bentuk pengekangan.Tahun lalu saja, ratusan ribu warga Taiwan turun ke jalan memprotes perjanjian dagang dengan Tiongkok.

Dengan keterlibatan banyaknya negara – negara dalam sengketa ini, maka perlu adanya penerapan sistem hukum yang berdasarkan pada suatu konvensi, traktat, atau perjanjian internasional yang telah diakui keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, UNCLOS III 1982 dapat menjadi salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa LCS dikarenakan sengketa ini bukan hanya merupakan suatu sengketa bilateral dan atau regional, tetapi merupakan suatu sengketa multinasional. Selain itu, isi dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCLOS III 1982 dapat mengakomodir penyelesaian sengketa yang terjadidi LCS.

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan Klaim Tiongkok Atas Laut China Selatan Dan Dampaknya Terhadap Kadaulatan Wilayah Taiwan sebagai judul penelitian yang diajukan.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik LCS berdampak pada kedaulatan wilayan Taiwan?

2. Bagaimana posisi Taiwan dalam konflik LCS?

3. Bagaimana penyelesaian sengketaLCS melalui Mahkamah Arbitrase Internasional?

1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai penyelesaian konflik LCS melalui Mahkamah Arbitrase Internasional dalam kerangka *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) II 1982.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana upaya Mahkamah Arbitrase Internasional menyelesaikan Konflik Laut China Selatan yang berdampak pada kedaulatan wilayah Taiwan”.

1. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk mengetahui apa saja upaya Taiwan dalam menghadapi konflik LCS
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh konflik LCS terhadap kebijakan ekonomi Taiwan
5. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik LCS melalui Mahkamah Arbitrase Internasionaldalam kerangka *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) II.
6. **Kegunaan Penelitian**

Dapat memberikan manfaat atau sumbangan terhadap penelitian-penelitian lain yang relevan dengan topic yang bersangkutan dan memudahkan peneliti – peneliti lainmencari suatu gambaran untuk menyelesaikan suatu karya ilmiah yang relevan dengan topik yang bersangkutan.

1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
2. **Kerangka Teoritis**

Pada bahasan ini, pernulis akan mencantumkan teori – teori dari para pakar terkait dengan hal – hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori – teori yang sudah ada.Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Realisme. Teori Realisme merupakan reaksi terhadap pemikiran utopianisme yang banyaj didominasi oleh studi politik di Amerika Serikat dalam rentang tahun 1940-an hingga 1960-an. Teori Realisme berkembang pada 4 asumsi besar, yakni :

1. *States are the principal or most important actors*.

Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, yang juga menjadi unit analisis dalam studi hubungan internasional.Studi hubungan internasional merupakan studi terhadap unit-unit (negara-negara) tersebut.Realisme hanya menekankan negara sebagai aktor utama, walaupun dalam perkembangan hubungan internasional, aktor non-negara juga memiliki peran penting dalam percaturan politik dunia.Perusahaan multinasional, kelompok teroris, NGO, dan aktor non-negara lainnya terkadang diakui perannya oleh kaum realis, tetapi tidak begitu ‘mengambil’ peran dalam hubungan internasional.Negara-lah yang menjadi aktor utama dan dominan.

1. *The state is viewed as a unitary actor.*

Negara dipandang sebagai unitary actor yang setidaknya bisa membuat suatu kebijakan terhadap suatu isu tertentu.Negara terintegrasi dengan dunia luar, yang menjadi ketunggalan dalam kedaulatannya terhadap percaturan politik internasional.

1. *The state is essentially a rational actor*.

Negara dianggap sebagai aktor rasional, meskipun kaum realis sebenarnya takut pada kesalahpahaman orang-orang dalam memandang negara sebagai aktor rasional.

1. *National Security usually tops the list.*

Bidang militer dan isu keamanan lain yang terkait mendominasi politik dunia. Kaum realis menganggap bahwa keamanan menjadi bagian paling penting dalam interaksi antar-negara. Terlebih karena sistem internasional pada dasarnya anarki dan manusia pada dasarnya egois dan haus akan kekuasaan. Kaum realis fokus pada potensi konflik yang terjadi antar-negara, sehingga pentingnya keamanan menjadi daftar paling atas dari setiap kepentingan aktor, yang dalam hal ini adalah negara berdaulat.Realisme pada dasarnya merupakan bentuk kritik terhadap perspektif idealisme, yang mereka anggap terlalu menyepelekan konsep power dalam hubungan internasional. Teori Realisme berkembang dan mendasar pada pemikiran bahwa *man is evil*. Aktor dalam perspektif realisme adalah negara, sebagai satu individual yang tidak akan bekerjasama dengan aktor lain tanpa ada maksud tertentu *(self-interests)*dan akan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri. Berawal dari sejarah studi Hubungan Internasional yang muncul antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, realisme hadir sebagai arus utama pendekatan hubungan internasional akibat ketidaksempurnaan pendekatan idealis dalam menjelaskan keadaan dan fenomena yang sedang terjadi kala itu.

Pandangan-pandangan yang menjadi fondasi aliran ini posisinya berseberangan dengan pemikiran para penganut idealisme. Adapun pandangan atau asumsi dasar dari perspektif realisme, antara lain :

* 1. Memandang secara pesimistis terhadap sifat dasar manusia yang cenderung berbuat baik. Perspektif ini berkeyakinan bahwa manusia itu bersifat jahat, berambisi untuk berkuasa, berperang, dan tidak mau bekerjasama;Bersikap skeptis terhadap kemajuan politik internasional dan politik domestic;
	2. Meyakini bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual atau berpotensi menghasilkan konflik. Dan konflik-konflik internasional yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan jalan perang;
	3. Menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara. Para pemikir realis juga menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas atau fokus utama dalam perspektif realisme.
	4. Realisme juga memfokuskan analisisnya pada power dan otonomi dalam interaksi internasional serta tentang tidak adanya keharmonisan di antara negara.[[13]](#footnote-13)Didalam Hubungan Internasional salah satu yang menjadi pokok kajian (core subject) adalah Politik Internasional, dimana memperjuangkan segala bentuk kepentingan dan kekuasaan.

 Pada hubungan Internasional orang hanya menyaksikan adanya berbagai macam bentuk interaksi antarnegara dalam masyarakat internasional, sedangkan dalam politik internasional bertalian dengan masalah interaksi karena adanya tindakan suatu negara serta reaksi atau respon dari negara lain.

Politik internasional dan hubungan internasional secara istilah dan pengertian itu sama, tetapi secara teoritis terdapat pebedaan. Politik internasional membahas tentang keadaan soal-soal politik ini di masyarakat internasional dalam arti yang sempit yaitu dengan berpokok atau bertitik tolak pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional adalah suatu istilah yang mencakup totalitas hubungan-hubungan dikalangan bangsa-bangsa dan kelompok dalam masyarakat dunia[[14]](#footnote-14)

**Menurut K.J. Holsti** dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

**"Politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi”**

Politik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut [[15]](#footnote-15)

Berdasarkan ruang lingkupnya, antara hubungan internasional dengan politik internasional terdapat perbedaan ruang lingkup, adapun ruang lingkup dari Politik Internasional adalah: “Ruang Lingkup Politik Internasional terbatas hanya pada “permainan kekuasaan” yang melibatkan negara-negara berdaulat, sehingga pelakunya hanyalah negara”(Perwita dan Yani 2005 : 39).

 Politik Internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan interplay antar aktor dalam lingkungannya. Adapun faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu:

* 1. Lingkungan Fisik seperti lokasi geografis, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa.
	2. Penyebaran sosial dan perilaku, yang didalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu.
	3. Timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya.

Tiongkok menganut politik luar negeri *one country two system.* Politik luar negeri ini dicetuskan oleh bapak pembangunan Tiongkok yaitu Deng Xiaoping. Setelah reunifikasi Tiongkok pada awal 1980an, ia menyarankan bahwa hanya boleh ada satu Tiongkok tapi daerah Tiongkok yang berbeda seperti Hong Kong dan Macau bisa mempertahankan sistem ekonomi dan politik kapitalis mereka sendiri, sedangkan sisanya dari Tiongkok menggunakan sistem sosialis. Di bawah prinsip, masing-masing dua daerah bisa terus memiliki sistem politiknya sendiri, hukum, urusan ekonomi dan keuangan, termasuk hubungan eksternal dengan negara-negara asing.[[16]](#footnote-16)

Tiongkok telah lama melakukan perubahan dalam kebijakan luar negerinya.Dimulai sejak tahun 1978, Tiongkok berusaha menjadi salah satu dari negara yang mapan.Pada saat masa pemerintahan Mao Zhedong, Tiongkok sudah menjadi salah satu negara yang diperhitungkan karena bermacam-macam pemikiran Mao yang merupakan jalan dijadikannya Tiongkok modern.Marxisme dan Leninisme adalah buah pikiran Mao yang menjadi kekuatan tawar menawar Tiongkok di politik internasional.Akan tetapi hal ini juga membuahkan konflik dengan Uni Soviet.

Namun, karena kepentingan ekonomi merupakan poros utama politik luar negerinya, sebenarnya Tiongkok telah mengalihkan sumber ideologis dan orientasinya, yaitu dari komunisme militan menjadi nasionalisme pragmatik.Untuk itu Tiongkok telah menyusun *Comprehensive National* Power untuk perumusan nasionalisme dalam praktik.Konsep power mengacu kekuatan bangsa mencakup seluruh sumber daya aktual maupun potensial yang dimiliki Tiongkok*(comprehensive)*, baik kultural, ekonomi, militer, geografi, jumlah penduduk, dan sebagainya yang, setelah dikalkulasi, diharapkan bisa mengetahui kekuatan tawar Tiongkok.Konsep power mengacu kekuatan bangsa mencakup seluruh sumber daya aktual maupun potensial yang dimiliki Tiongkok, baik kultural, ekonomi, militer, geografi, jumlah penduduk, dan diharapkan bisa mengetahui kekuatanTiongkok.

Bergabungnya Tiongkok dengan WTO (*World Trade Organitation)* tidak juga bisa dikatakan, Tiongkok lebih memihak pada negara-negara maju dan mapan. Bergabungnya Tiongkok dengan WTO dan kerja sama regional seperti APEC *(Asia-Pacific Economic Forum)*, ARF *(ASEAN Regional Forum),* kemitraan strategisnya dengan India dan semacamnya merupakan wujud pendekatan instrumental yang kalkulatif.Dengan begitu Tiongkok tidak akan menunjukan antusiasme berlebihan maupun sikap antipati terhadap skema organisasi-organisasi multilateral yang ada.

Berdasar CNP inilah, tujuan strategis politik luar negeri Tiongkok bisa diidentifikasi sebagai berikut: pertama, melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keamanan Tiongkok; kedua, melindungi dan menopang pembangunan ekonomi dan teknologi; ketiga, menciptakan situasi yang kondusif dan damai di Asia-Pasifik; keempat, memberi respons efektif pada tantangandan ancaman dari luar; kelima, mencegah konflik internal dan eksternal; keenam, meningkatkan status dan prestise Tiongkok di mata internasional.

Tentunya, tujuan itu bisa menjadi acuan politik luar negeri negara-negara lain. Namun, yang menarik dari kasus Tiongkok adalah setelah kurang lebih 27 tahun menjalankan proses modernisasi, kecepatan pertumbuhannya begitu mencengangkan (di atas sembilan persen per tahun) dan menjadi tonggak tersendiri dalam wacana teori-teori ekonomi pembangunan dan kajian-kajian strategi serta teknologi pertahanan.

Kekuatan ekonomi Tiongkok juga diramalkan akan ditunjang oleh kekuatan pertahanan yang tangguh pada sekitar 2025, mengingat Tiongkok sedang memodernisasi angkatan bersenjatanya dengan menggabungkan upaya alih teknologi militer, terutama dari Rusia, serta pengembangannya lebih lanjut berdasar kemampuan sendiri. Penggabungan kekuatan ekonomi dan militer yang tangguh di masa depan ini dilihat banyak pengamat tidak pernah bisa diraih Uni Soviet di masa-masa jayanya sekalipun.

Pemikiran nasionalisme pragmatis ini diramalkan tetap mewarnai kebijakan baik faksi konservatif maupun faksi reformis pimpinan Tiongkok di abad ke-21.Kedua faksi itu didorong rasa kebanggaan nasional, keutuhan wilayah, dan kehendak memulihkan kebesaran Tiongkok.Karena itu, bisa saja nasionalisme pragmatik menjadi militan dan agresif, jika para pemimpin Tiongkok melihat komunitas internasional menghalanginya untuk bangkit menjadi pemain strategis dunia.Bahwa perdamaian menjadi prinsip politik luar negeri Tiongkok, telah jelas dinyatakan Deng Xiaoping sendiri,

**"politik luar negeri Tiongkok memegang teguh dua prinsip. Pertama, menentang hegemonisme dan politik adu kekuatan, serta menjaga perdamaian dunia.Kedua, menegakkan tatanan politik dan ekonomi internasional yang baru" (Discovering Chinese Nationalism in Tiongkok, 1999).**

Dengan prinsip politik luar negeri yang demikian, sebenarnya nasionalisme pragmatis merupakan prinsip dasar Tiongkok untuk memasuki komunitas internasional dengan penuh percaya diri, sebagaimana 55 tahun lalu, Marxisme-Leninisme merupakan prinsip dasar Tiongkok untuk menjadikannya negara independen dan modern.

Dalam konteks Republik Tiongkok, partai-partai politik berkembang di Taiwan, pemilihan umum berlangsung secara teratur, organ-organ trias politica (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) terstuktur.Saat ini Ma Ying-jeou dari partai Kuomintang menduduki jabatan kepala eksekutif.Bahkan, Taiwan memiliki Angkatan Bersenjata yang lengkap; satu-satunya lembaga pemilik otoritas penggunaan kekerasan dalam sistem negara bangsa modern.

Adanya prinsip satu Tiongkok, membuat posisi Taiwan di mata internasional tersisih dan negara-negara lain melaksanakan *One TiongkokPolicy*. Usaha Tiongkok dalam mengkampanyekan *One TiongkokPrincipal* telah berlangsung melalui diplomasi panjang, baik secara bilateral maupun multilateral sejak deklarasi RRT 1949. Perseteruan utama antara pemerintahan di Beijing dan Taipei adalah keduanya menyepakati adanya satu Tiongkok namun berbeda dalam mengakui pemilik legitimasi pemerintahannya.

Resolusi nomor A/RES/2758 adalah kemenangan diplomasi Tiongkok, khususnya dalam memenangkan dukungan negara-negara berkembang yang merupakan mayoritas dalam Majelis Umum PBB. Dalam era kebangkitan ekonomi Tiongkok dewasa ini, Tiongkok telah membanjiri negara lain dengan komoditas murah. Samuel Huntington dalam *Clash of Civilizations* mengatakan bahwa Tiongkok adalah negara dengan kekuatan ekonomi yang dapat membelenggu dunia.

Mestinya ini tidak dilihat dengan kacamata teori *Tiongkok’s Threat s*emata. Tetapi juga dengan fakta bahwa Tiongkok telah aktif dalam aktivitas investasi di negara lain dan berkontribusi positif melalui bantuan asing dalam berbagai kesempatan. Dengan demikian, hal ini menjadi soft power yang mengikat negara lain untuk mempertahankan One Tiongkok Policy mereka.[[17]](#footnote-17)

Gagasan tentang konflik pada dasarnya adalah untuk mengalahkan yang lain *(configure)*. Namun, dalam perkembangannya, konflik tidak hanya dimanifestasikan sebagai suatu bentuk perselisihan secara fisik belaka.Konflik dapat terjadi karena adanya beberapa perbedaan yang sulit untuk mencapai titik temu seperti pengetahuan, keyakinan, kebudayaan serta adat istiadat.

Menurut **Soerjono Soekanto** dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut dengan konflik.

Menurut **Max Weber** Hubungan disebut sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja ditujukan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain’. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain.[[18]](#footnote-18)

Secara umum penyebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut:

* 1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
	2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
	3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.
	4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan masyarakat yang telah ada.

Konflik LCS dimulai sejak klaim Tiongkok atas seluruh wilayah perairan ini tanpa sumber hukum yang jelas, Tiongkok mengacu pada peta kuno mengenai luaw wilayah perairan yang mereka kuasai semenjak Dinasti Qing, Perairan ini memiliki potensi yang sangat besar. Setiap tahunnya, barang-barang senilai US$ 5 triliun melintas, karena jalur ini menghubungkan Asia dengan Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Tak hanya di atas air, di dalamnya juga ada sumber daya alam yang luar biasa. LCS dipercaya menyimpan 11 miliar barel minyak, dan 190 triliun kubik gas alam.

Negara-negara yang berada di teritori ini, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, berlomba-lomba untuk meninggalkan 'penanda' berupa basis militer. Langkah ini diambil sebagai bentuk klaim atas daerah tertentu.Namun, dalam 20 bulan belakangan, pergerakan Tiongkok dalam hal penetapan hak milik di teritori ini semakinagresif.Mereka mengklaim pulau 17 kali lebih banyak dibandingkan negara lainnya – bahkan mulai menerobos ke wilayah negara lain.[[19]](#footnote-19)

politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan kepada negara lain. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian politik luar negeri adalah strategi atau taktik yang digunakan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan biasanya dalam hal mengeluarkan doktrin, diplomatik, mencanangkan tujuan dalam waktu yang lama atau singkat dan membuat aliansi.

Secara Terminologi, pengertian politik luar negeri dibagi dalam dua hal yaitu Teori Hubungan Internasional (THI) dan Politik Luar Negeri (PLN), Teori hubungan internasional adalah membahas tentang pemahan-pemahaman ideologi yang ada didunia dan kerja sama negara-negara dalam suatu organisasi internasional.

Tujuan Politik Luar Negeri

1. Menjaga kemerdekaan bangsa serta melindungi keselamatan negara.
2. Mendapatkan beberapa barang yang dibutuhkan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
3. Meningkatkan perdamaian internasional.
4. Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa

Kepentingan nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas di kalangan para penstudi hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama Negara bangsa *(Nation State )* masih merupkan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan Negara-negara menjalankan hubungan internasional *(international relation )*adalah kepentingan nasionalnya.

**Paul Seabury**mendefenisikan :

**“kepentingan nasional secara normatif dan deskriptif: secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapaioleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan Negara lain”.**

 **Hans J Morgenthau** menyebutnya sebagai power ( pengaruh,kekuasaan dan kekuatan)[[20]](#footnote-20)

Berbeda dengan Morgenthau **Joseph Frankel,**menyangkal pendapat tersebut dengan menekankan pada kepentingan moral,religi dan kepentingan manusia lainnya.

**George F. Kennan**memahami makna konsep kepentingan nasional (national interest )dalam hubungan antarnegara. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antarbangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara.Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri.Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara.Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatan kesejahteraan warga negara. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukanmerupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalahcara dan metode yang tepat bagi penyelenggaran hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.[[21]](#footnote-21)

Kebijakan luar negeri suatu negara, yang juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional.Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.

Biasanya, tugas menciptakan kebijakan luar negeri adalah wewenang kepala pemerintahan dan menteri luar negeri (atau jabatan yang setara).Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di Perancis dan Finlandia, di mana kepala negara adalah yang bertanggung-jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung-jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal,di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, kepala negara (yaitu Presiden) juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.[[22]](#footnote-22)Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dengan teguh tak tergoyahkan menjalankan politik luar negeri damai yang bebas merdeka dengan tujuan pokoknya memelihara kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok, menciptakan suatu iklim internasional yang kondusif untuk reformasi dan keterbukaan serta modernisasi Tiongkok, memelihara perdamaian dunia dan mendorong perkembangan bersama. Isi utamanya meliputi: Tiongkok senantiasa menjalankan prinsip bebas merdeka, tidak bersekutu dengan negara besar atau kelompok negara manapun, tidak mendirikan kelompok militer, tidak ikut serta dalam perlombaan persenjataan dan tidak mengadakan perluasan militer.

Tiongkok menentang hegemonisme, memelihara perdamaian dunia dan berpedirian semua negara baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah serta miskin maupun kaya sama-sama adalah anggota masyarakat internasional yang sama derajat. Persengketaan dan konfrontasi antar negara seharusnya diselesaikan secara damai melalui musyawarah, tidak seharusnya menggunakan kekuatan bersenjata atau mengacam dengan kekuatan bersenjata, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih apapun. Tiongkok dengan aktif mendorong pembinaan tata baru politik dan ekonomi internasional yang adil dan rasional.lima prinsip hidup perdampingan secara damai dan patokan hubungan internasional lain yang diakui umum harus dijadikan sebagai dasar pembinaan tata baru politik dan ekonomi internasional.

Tiongkok bersedia menggalang dan mengembangkan hubungan kerja sama bersahabat dengan semua negara di atas dasar saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, saling tidak mengagresi, saling tidak mengintervensi urusan dalam negeri, persamaan derajat dan saling menguntungkan dan lima prinsip hidup perdampingan secara damai. Tiongkok melaksanakan politik terbuka terhadap dunia luar secara menyeluruh, bersedia di atas dasar prinsip persamaan derajat dan saling menguntungkan mengembangkan hubungan perdagangan , kerjasama ekonomi dan teknik serta pertukaran ilmu dan budaya secara luas dengan berbagai negara dan daeah di dunia, untuk mendorong kemakmuran bersama. Selama lebih 50 tahun berdirinya RRT, dalam diplomasi Tiongkok telah terbentuk seperangkat langgam diplomatik yang berciri khas Tiongkok melalui pemadatan, penyesuaian kembali dan perkembangan serta penyempurnaan kebijakan. Memandang ke depan, kecenderungan multipolarisasi konfigurasi dunia dan globalisasi ekonomi terus berkembang dan hubungan internasional tengah mengalami penyesuaian kembali yang mendalam. Perdamaian, kerja sama dan mendorong perkembangan telah menjadi seruan bersama rakyat berbagai negara.

Diplomasi Tiongkok di samping menghadapi pelung juga menghadapi tantangan.Maka diharuskan senantiasa berfikiran jernih, meningkatkan kesadaran krisis, kesadaran keamanan dan kesadaran menghadapi perubahan. Dengan tepat mengenal dan menguasai iklim internasional dengan bertolak dari kecenderungan umum perubahan situasi internasional, memanfaatkan sebaik-baiknya peluang, Menyongsong tantangan dan memanfaatkan faktor yang menguntungkan dan menyingkirkan faktor yang merugikan. Tiongkokakan terus dengan sungguh-sungguh melaksanakan politik luar negeri yang bebas merdeka, terus merintis situasi baru pekerjaan diplomatik, menciptakan lebih lanjut iklim perdamaian internasional yang kondusif untuk modernisasi sosialis Tiongkok dan memberikan sumbangan untuk usaha perdamaian dan pembangunan dunia[[23]](#footnote-23)

Kedaulatan, merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemeritahan yang berdaulat.Dengan demikian, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme) dan tak terbatas (unlimited).

Arti kenegaraan sebagai kewibawaan atau kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari negara disebut dengan kedaulatan. Dengan demikian, kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain.

Jean Bodin (1500 – 1596) seorang ahli Prancis, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara.Iamemandang pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 (empat) sifat pokok sebagai berikut.

1. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
2. Permanen, artinya kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti.
3. Tunggal (bulat), artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain
4. Tidak Terbatas (absolut), artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap.

Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam (interne souvereiniteit) dan ke luar *(externe souvereinoteit)*, yaitu sebagai berikut.

* + 1. Kedaulatan Ke Dalam : Pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		2. Kedaulatan Ke Luar : Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan negara lain, harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

Beberapa teori tentang kedaulatan tersebut, di antaranya sebagai berikut.

Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara.Kodrat alam merupakan sumber kedaulatan.Penerapan hukum mengikat disebabkan karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak.Tokoh teori ini adalah Paul Laband dan George Jellinek.

Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut teori ini negara memiliki kekuasaan dari rakyatnya yang bukan dari Tuhan atau Raja.Teori ini merupakan reaksi dari teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan raja.Teori ini memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat (demokrasi).Tokoh teori ini adalah J.J. Rousseau dan Montesquieu.

* + 1. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaannya berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum.Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara.Rakyat atau pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.Tokoh teori ini adalah Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit.

Seiring dengan pengucilan Republik Tiongkok oleh dunia internasional, nasionalisme Taiwan juga tumbuh di dalam Taiwan.Nasionalisme Taiwan ini muncul karena adanya perasaan bahwa Kuomintang adalah pemerintahan dari daratan Tiongkok, demikian pula halnya Republik Tiongkok.Kalangan nasionalis Taiwan ini kemudian mengusahakan perjuangan ke arah kemerdekaan Taiwan sebagai negara yang berdaulat, suatu hal yang tidak diinginkan oleh Republik Tiongkok yang dikuasai Kuomintang pada waktu itu.aiwan menjadi sebuah wilayah yang mempunyai syarat-syarat sebagai negara berdaulat namun tidak mempunyai kedaulatan di dunia internasional karena kurangnya pengakuan dan dukungan diplomatik. Saat ini, negara-negara yang masih berhubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok berjumlah 25 negara, mayoritas adalah negara-negara kecil yang tidak mempunyai pengaruh besar di percaturan politik internasional.

Regionalisme sering diartikan sebagai derajat kepaduan sosial (etnik, bahasa, agama, budaya, sejarah), ekonomi (perdagangan), politik (tipe rezim, ideologi), dan organisasional (institusi regional formal).Seperti yang dikatakan John Ravenhill dalam artikelnya “Regionalism”, Hurrell juga mengatakan bahwa tidak ada regionalisme yang terjadi secara alami.Semua kawasan merupakan sebuah konstruksi sosial sehingga tidak mudah untuk mendefinisikannya.Definisi setiap kawasan bisa berbeda tergantung konteks masalah dan pembentukannya.

Konsep regionalisme bisa dibedah dalam lima kategori, yaitu:

Regionalisasi

Regionalisasi adalah pertumbuhan integrasi sosial di dalam suatu kawasan dan proses interaksi sosial dan ekonomi secara tidak langsung. Ada yang menyebutnya sebagai proses ekonomi yang berdampak kepada adanya ketergantungan di antara negara-negara dalam suatu kawasan yang “given”. Pemikir lama mengatakannya sebagai integrasi informal sedangkan pemikir kontemporer mengatakannya sebagai “soft regionalism”.Kata kunci dari regionalisasi adalah migrasi, pasar, jaringan sosial.Ketiga hal tersebut dapat meningkatkan interaksi yang mengikat negara-negara dan membentuk kawasan baru yang lintas batas.

Identitas dan kekhawatiran regional

**Emmanuel Adler** memberikan sebuah istilah “cognitive regions”. Menurutnya, kawasan itu seperti bangsa, merupakan komunitas yang diimajinasikan yang mempunyai wilayah tertentu dan mengabaikan yang lain. Jadi, ada persepsi tentang kepemilikan bersama terhadap sebuah komunitas berdasarkan faktor internal yaitu kesamaan budaya, sejarah, atau tradisi relijius dan faktor eksternal karena menganggap ada ancaman keamanan yang sama atau budaya dari luar kawasan.

Kerjasama antarnegara dalam satu kawasan

Aktivitas regionalisme antara lain mencakup negosiasi dan konstruksi kerjasama antarnegara atau antarpemerintahan atau rezim. Regionalisme bisa dijadikan sebagai cara merespon tantangan eksternal, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan nilai-nilai bersama, dan menyelesaikan masalah bersama.

* + 1. Integrasi regional yang dipromosikan oleh negara

Peter Smith memberikan beberapa dimensi untuk menggambarkan integrasi regional ekonomi, yaitu scope (isu), depth (harmonisasi kebijakan), institusionalisasi, dan sentralisasi (otoritas efektif).Pada awalnya, integrasi berkonsentrasi pada eliminasi penghambat perdagangan dan pembentukan kemudahan mobilisasi barang, jasa, modal, dan manusia.

* + 1. Kohesi regional

Kohesi regional merupakan kemungkinan yang dapat terjadi apabila keempat kategori sebelumnya bisa terpenuhi.Kohesi memiliki dua arti. Pertama, ketika suatu kawasan memainkan peran penting dalam hubungannya dengan negara atau dengan aktor lain. Kedua, ketika suatu kawasan membentuk basis yang terorganisasi untuk mengambil kebijakan dalam setiap isu.

**Asumsi**

Berdasarkan kerangka Teoretis diatas maka penulis dapat menarik asumsi sebagai berikut:

1.Konflik LCS dinilai sangat merugikan pihak Taiwan karena LCS adalah jalur perdagangan strategis bagi berbagai negara dan claimant states yang bersengketa dalam konflik ini.

2. Upaya Mahkamah Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan Konflik LCS cukup efektif karena Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan LCS.

1. **Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan sementara mengenai hubungan variabel atau lebih. Dalam pengujian hipotesis ini, dengan pernyataan hipotesis apabila : **”Dengan adanya upaya claimant states terhadap klaim China di Mahkamah Arbitrse Internasional dan dimenangkan oleh claimant states maka kedaulatan wilayah Taiwan akan terlindungi.”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

**Tabel 1 Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis****(Teoretik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verivikasi****(Analisis)** |
| Variabel Terikat:Upaya *claimant states* terhadap klaim Tiongkok dan dimenangkan oleh *claimant states.* | 1. Upaya Tiongkok mengklaim seluruh wilayah perasbiran LCS berlandaskan data historis.
2. *Claimant states:* Filipina, Thailand, Singapura, Brunai Darusallam, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam.
3. dimenangkan melalui Mahkamah Internasional.
 | Latar belakang sejarah Tiongkok kuno tentang peta wilayah kedaulatan Tiongkok**.** |
| Maka kedaulatan wilayah Taiwan akan terlindung. | Dengandimenangkannya kasus oleh *claimant states* maka wilayah Taiwan sebagai penguasa pulau terbesar di kepulauan Spartly yaitu pulau Aba (Taiping Dao) akan terlindungi. | http://republika.co.idhttps://www.academia.edu/ |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

****

**Pijakan resmi claiman states mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS *(United Nation Convention Law Of The Sea )*yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982.**

**Mahkamah Arbitrase Internasional menolak klaim China atas LCS dikarenakan tidak memiliki landasan hukum yang jelas**

**\\\**

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1.Tingkat Analisis**

Terdapat tigamodel hubungan antara unit analisa dan unit eksplainasi yaitu model korelasionis, model induksionis, dan model reduksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang dioergunakan adalah model Analisa Induksionisme dimana unit eksplainasi dan analisa berada pada tingkatan yang sistem, yaitu Dampak Konflik LCS Terhadap Kedaulatan Wilayah Taiwan.

**2.Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif.Maksud dari metode Deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data. Tujian dari penelitian Dsekriptif ini analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh perseorang dalam menghadapi suatu masalah. Pengumpulan informasi secara actual dan secara rinci dan mengidentifikasi masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi mengenai fenomena yang sedang berkembang.

**3.Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data adalah suatu komponen utama dalam sebuah penelitian, yang berarti jika data tidak terkumpul dnegan baik dan benar maka penelitian tidak akan berkembang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pengumpulan data kepustakaan, yang dimana studi pengumpulan data kepustakaan itu sendiri adalah mencari data atau referensi buku sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini.Tentunya data dan referensi yang penulis gunakan melalui media cetak, artikel, buku, artikel dari pemerintah dan non pemerintah dan melalui media Internet yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**

**1.Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung lantai 2. Jl. Lengkong Besar Dalam 11 No. 17D Bandung
2. Media Internet.

**2.Lamanya Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan.

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematiak penulisan

**BAB II : OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Bab ini berisikan uraian atau informasi umum atau dasar mengenasi tema atau masalah yang dijadijan variable bebab.Disini penulis menjelaskan secara umuam tentang Dampak Konflik LCS dan implikasinya terhadap negara-negara yang menjadi *claimant states.*

**BAB III : OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini berisikan uraian mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Kedaulatan Wilayah Taiwan.

**BAB IV : VERIVIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indicator variable bebas dan variable terikat. Adapun isi bab ini adalah sejauh mana Dampak Konflik LCS berpengaruh terhadap Kedaulatan Wilayah Taiwan.

**BAB V : KESIMPULAN**

 Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesis serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasan dan kata penutup serta saran.

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Laut\_China\_Selatan, LCS, diakses tanggal 25 Januari [↑](#footnote-ref-1)
2. www.anneahira.com, Loc.Cot. [↑](#footnote-ref-2)
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Laut\_China\_Selatan, Loc.Cit. [↑](#footnote-ref-3)
4. Evelyn Goh, Op.Cit., hal. 19 [↑](#footnote-ref-4)
5. Evelyn Goh (2005), Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional

Security Strategies, East-West Center Washington, hal. 9 [↑](#footnote-ref-5)
6. http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html,

Ann Marie Murphy, Sengketa Kepulauan Spratly, Potensi Konflik di Asia Tenggara, diakses

tanggal 25 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Simela Victor Muhammad, Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa LCS : Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV No. 08/II/P3DI/April /2012 Hal. 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. United Nation Covenant on Law of Sea -UNCLOS) tahun 1982.) [↑](#footnote-ref-8)
9. Fakta insiden konflik militer skala kecil : Tahun 1988 China Vs Vietnam, kedua AL bentrok di

Jhonson Reef kepulauan Spratly yang menyebabkan beberapa kapal laut Vietnam tenggelam dan 70

prajurit AL gugur. Tahun 1995 Taiwan Vs Vietnam, Taiwan menembakan arteleri ke kapal angkatan

laut Vietnam. Tahun 1996, China Vs Philipina, Tiga kapal patroli AL China terlibat baku tembak

hampir 90 menit dengan kapal AL Philipina di Kepulauan Spratly. [↑](#footnote-ref-9)
10. www.kompas.com, China Tantang Vietnam Perang, diakses pada 25 Januari2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. www.eia.gov, US Energy Information and Administration, South China Sea, 2008, diakses

tanggal 25 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. KOMPAS edisi, Rabu 22 Juni 2011, China Tantang Vietnam Perang,. Diakses tgl 25 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. www.academia.edu. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wiraatmadja, 1970:33. [↑](#footnote-ref-14)
15. Dahlan, 1991:7. [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://en.wikipedia.org> diakses pada 10 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-16)
17. hi.umy.ac diakses pada 10 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-17)
18. Weber, Max 1949. *“The Methodology Of The Social Sciences”* hal 144 [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://www.rappler.com> diakses pada 10 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-19)
20. Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations 1948*  [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. https://id.wikipedia.org [↑](#footnote-ref-22)
23. <http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40201.html> diakses pada 10 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-23)